

**KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI INDONESIA**
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2020)

ABSTRAK

Ahmad Alhadi *

Munculnya gagasan tentang Pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh masyarakat.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Hukum Administrasi Negara, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serdang Bedagai dikaji dari Hukum Administrasi Negara, bagaimanakah hambatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dan solusi mengatasinya.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang dan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan komisioner KPUD Serdang Bedagai. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Hukum Administrasi Negara diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19 adalah adanya *money politic* yang disamarkan dalam bantuan sosial, Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19 adalah tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti Pilkada serentak 2020 sehingga hambatan dan tantangan Pilkada dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pemilihan, Kepala Daerah.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**STATE ADMINISTRATIVE LEGAL STUDY ON THE IMPLEMENTATION
OF HEAD ELECTION REGIONS IN INDONESIA
(Study on the Regional Head Election of Serdang Bedagai Regency
in 2020)**

ABSTRACT

Ahmad Alhadi *

The emergence of the idea of direct Pilkada is basically a follow-up process from a strong desire to improve the quality of democracy in the regions that is being started. Direct local elections are expected to produce credible leaders who are supported by the community.

The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements for implementing regional head elections in Indonesia according to State Administrative Law, how the implementation of regional head elections in Serdang Bedagai Regency is studied from State Administrative Law, how are the obstacles to implementing regional head elections in Serdang Bedagai Regency in terms of State Administrative Law and solution to overcome it.

The type of this research is normative juridical, namely research based on law and empirical juridical, namely by conducting interviews with KPUD commissioner Serdang Bedagai. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out using deductive-inductive logic of thinking that is done with the theory that is used as a starting point for conducting research.

The results of the study indicate that the legal regulation of the implementation of regional head elections in Indonesia according to the State Administrative Law is regulated in Perpu No. 2 of 2020 concerning the simultaneous election of blood heads (Pilkada). The obstacle to the implementation of the Serdang Bedagai Regional Head Election (Pilkada) Simultaneously in carrying out the simultaneous Pilkada during the Covid-19 pandemic is the existence of money politics disguised in social assistance. To uphold integrity in the implementation of the Pilkada, there must be a commitment for both the Pilkada participants and the implementers of community discipline to take part in the 2020 simultaneous Pilkada so that the obstacles and challenges of the Pilkada can be minimized.

Keywords: Implementation of Election, Regional Head.

**Students of the Postgraduate Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*